

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian tentang negara yang tidak dapat menjalankan fungsi minimalnya sebagai penyedia pelayanan publik bagi warganegara. Pelayanan publik yang dimaksud adalah jalan raya. Jalan raya merupakan akses yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi infrastruktur jalan raya di Kabupaten Banjarnegara telah diketahui mengalami banyak kerusakan dan sudah cukup lama dalam kondisi tersebut.

Pertanyaan besar dari penelitian ini adalah “Mengapa negara abai dalam pemenuhan hak jalan raya bagi warga Kabupaten Banjarnegara?”. Pertanyaan tersebut menjadi kunci dalam penelitian ini untuk menjelaskan kelemahan negara dalam urusan pelayanan publik. Negara memiliki birokrasi sebagai representasi dalam memberikan pelayanan publik bagi warga. Birokrasi yang memiliki tanggung jawab terhadap sarana jalan raya di Kabupaten Banjarnegara adalah DPUPR. Kerusakan yang terjadi di jalan raya Kabupaten Banjarnegara merupakan bentuk dari lemahnya negara dalam memberikan pelayanan publik bagi warga Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam tidak terstruktur memberikan peneliti pandangan yang lebih luas dalam proses penelitian.

Temuan dari tulisan ini adalah gejala *weak-state* terus membayangi DPUPR sebagai representasinya, pada penelitian ini, pembacaan Negara lemah lebih di tekankan dari kinerja Birokrasi, dalam hal ini DPUPR, yang lemah dalam eksekusi pada penyediaan sarana jalan raya yang memadai bagi warga Kabupaten Banjarnegara sehingga menyebabkan warga menjadi apatis pada Birokrasi di daerahnya.

Kata kunci : Jalan raya, *Weak-state*, Birokrasi, Kinerja

ABSTRACT

This research is a study of a state that cannot carry out their minimum functions as providers of public services for citizens. The intended public service of this research is the highway. The highway is an access that connects one area to another, likewise in Banjarnegara Regency. The condition of the road infrastructure in Banjarnegara Regency has been known for a lot of damage for the long time.

The big question from this research is "Why is the state neglecting the fulfillment of highway rights for the people of Banjarnegara regency?". This question is the key in this study to explain the weaknesses of the state in matters of public service. The state has a bureaucracy as a representation in providing public services for citizens. Bureaucracy that has responsibility for road facilities in Banjarnegara Regency is DPUPR. The damage that occurred on the highway of Banjarnegara Regency is a form of weak state to provide public services for residents of Banjarnegara Regency. This research is a qualitative study with case study methods, field observations as data collection way and in-depth unstructured interviews gives researchers a broader view of the research process.

This research shows that the weak state symptoms continue to overshadow the DPUPR as the state representation. In this study, the term of the weak state is emphasized more on the performance of the bureaucracy, in this case the DPUPR. The term of weak itself intended in the execution on the provision of adequate road facilities for the peoples of Banjarnegara Regency that cause the citizens to become apathetic to the bureaucracy in their area.

Keywords : Highway, weak-state, bureaucracy, performance